

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN PULAU TALIABU*FINANCIAL PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT OF SULA ISLANDS BEFORE AND AFTER THE SPLITTING OF TALIABU ISLAND*

Oleh:
Fitria Soamole¹
Marjam Mangantar²
Joy E.Tulung³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹Soamole.fitria@gmail.com

²marjam.mangantar@gmail.com

³joy.tulung@unsrat.ac.id

Abstrak : Kabupaten kepulauan sula pada dasarnya terdiri dari 3 pulau besar yaitu pulau sulabesi, pulau mangoli dan pulau taliabu hingga pada tanggal 14 desember 2012 pulau taliabu mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Taliabu. Pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa menjadi dua daerah atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan Sula sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu pada tahun 2009-2012 dan 2013-2016. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan dan uji beda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian belanja operasi, rasio keserasian belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lebih baik saat sesudah pemekaran pulau taliabu. Sedangkan, derajat desentralisasi, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan PAD pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lebih baik saat sebelum pemekaran pulau taliabu. Dan berdasarkan uji simultan *paired sample T test*, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan Sula sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu. Sehingga, pengukuran kinerja keuangan daerah ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi atas pelaksanaan laporan keuangan sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

Kata Kunci : kinerja keuangan, pemekaran daerah, dan rasio keuangan pemerintah daerah.

Abstract : *The island of sula basin basically consists of 3 major islands of sulabesi island, mangoli island and taliabu island until on 14 december 2012 taliabu island experiencing the split into Taliabu Regency. Division region / region is the splitting of a government either province, regency / city, sub district, village into two or more areas. This study aims to determine differences in financial performance of the government of Sula Islands before and after the splitting of taliabu island in year 2009-2012 and 2013-2016. Data analysis methods used are financial ratios and different test. The results of this study indicate that based on the ratio of regional financial dependence, the ratio of PAD efficiency, the ratio of operational expenditure alignment, the ratio of capital expenditure alignment on the financial performance of the government of Sula Islands Islands better when after the splitting of Taliabu Island. Meanwhile, the degree of decentralization, the independence ratio and the ratio of PAD growth in the financial performance of the government of Sula Islands is better before the splitting of Taliabu Island. And based on simultaneous test paired sample T test, showed that there was no significant difference between financial performance of Sula Islands before and after the splitting of taliabu island. Thus, the measurement of regional financial performance is expected to be a recommendation on the implementation of financial statements as a correction and input to enhance the role of government in improving public accountability.*

Keywords : *financial performance, split region, and local government financial ratios.*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Indonesia memiliki 35 provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Maluku Utara yang memiliki sembilan Kabupaten salah satunya yaitu Kabupaten Kepulauan Sula yang ber-Ibu Kota Sanana. Sebagai wilayah berkepulauan, sebagian besar penduduk di Kabupaten Kepulauan Sula tinggal di sepanjang pesisir pantai dari tiga pulau utama yaitu Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli, dan Pulau Taliabu. Pada tanggal 14 Desember 2012 salah satu pulau Kabupaten Kepulauan Sula mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Pulau Taliabu, hingga pada tahun 2013 Pulau Taliabu secara administratif berdiri sebagai Kabupaten baru. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penelitian sebelumnya yang hampir sama telah dilakukan oleh Pauwah, Saerang dan Mandey (2014) menunjukkan bahwa Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2008-2012 berdasarkan rasio kemandirian dapat di kategorikan baik. Hal ini di sebabkan nilai rasio kemandirian yang tinggi di atas rata-rata. Walaupun sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 rasio kemandirian daerah Kabupaten Sula mengalami penurunan. Sehingga kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sula tahun 2008-2012 dapat dinyatakan terdapat perbedaan akan tetapi tidak signifikan.

Sehubungan dengan hasil penelitian sebelumnya serta berdasarkan pengamatan penulis sampai sekarang belum ada yang melakukan penelitian terkait kinerja keuangan Kab.Kep.Sula sesudah Pemekaran Pulau Taliabu. Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan untuk meneliti dengan judul “Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sebelum dan Sesudah Pemekaran Pulau Taliabu”. Tahun yang akan diteliti pada sebelum pemekaran yaitu tahun 2010-2012 dan sesudah pemekaran yaitu 2013-2015, dikarenakan tahun-tahun tersebut memiliki data yang lebih akurat dibandingkan tahun-tahun lainnya.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Kab.Kep.Sula berdasarkan sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran pulau Taliabu.

TINJAUAN PUSTAKA**Pemekaran**

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 33 ayat (1) bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Zafra-Gomez et al. (2009) dalam Asri (2016) menyatakan bahwa penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan data anggaran, informasi ekonomi, maupun informasi keuangan. Kinerja keuangan merupakan alat ukur yang baik dalam menilai kinerja manajemen pemerintah lokal. Lebih lanjut Mahmudi (2016 : 89) mengemukakan bahwa kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk dapat memberikan gambaran kinerja keuangan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2016:140), Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016:140), Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat dan/atau pemerintah provinsi. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016:140), Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut adalah Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah menurut Abdul Halim (2007) dalam Adhiantoko (2013) :

Tabel. 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007) dalam Adhiantoko (2013)

4. Rasio Efisiensi

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Berikut rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut (Hamzah, 2006 dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti, 2013) :

$$\text{Rasio efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi penerimaan}} \times 100\%$$

Berikut kriteria penilaian kinerja keuangan berdasarkan Mahsun (2006) dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013), yaitu sebagai berikut :

- Sangat efisien : $\leq 60\%$, Efisien : $>60\% - 80\%$, Cukup efisien : $>80\% - 90\%$, Kurang efisien : $90\% - 100\%$, Tidak efisien : $\geq 100\%$

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1. Rasio pertumbuhan PAD

Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013), rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan berdasarkan Wahyuni (2010) dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013), sebagai berikut:

$$\text{Rasio pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan: Xn = Tahun yang dihitung,
Xn-1 = Tahun sebelumnya

2. Rasio Keserasian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi (2016:162), Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu 60-90 persen. Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja operasi thd total belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Keserasian Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi (2016:162), Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dilakukan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

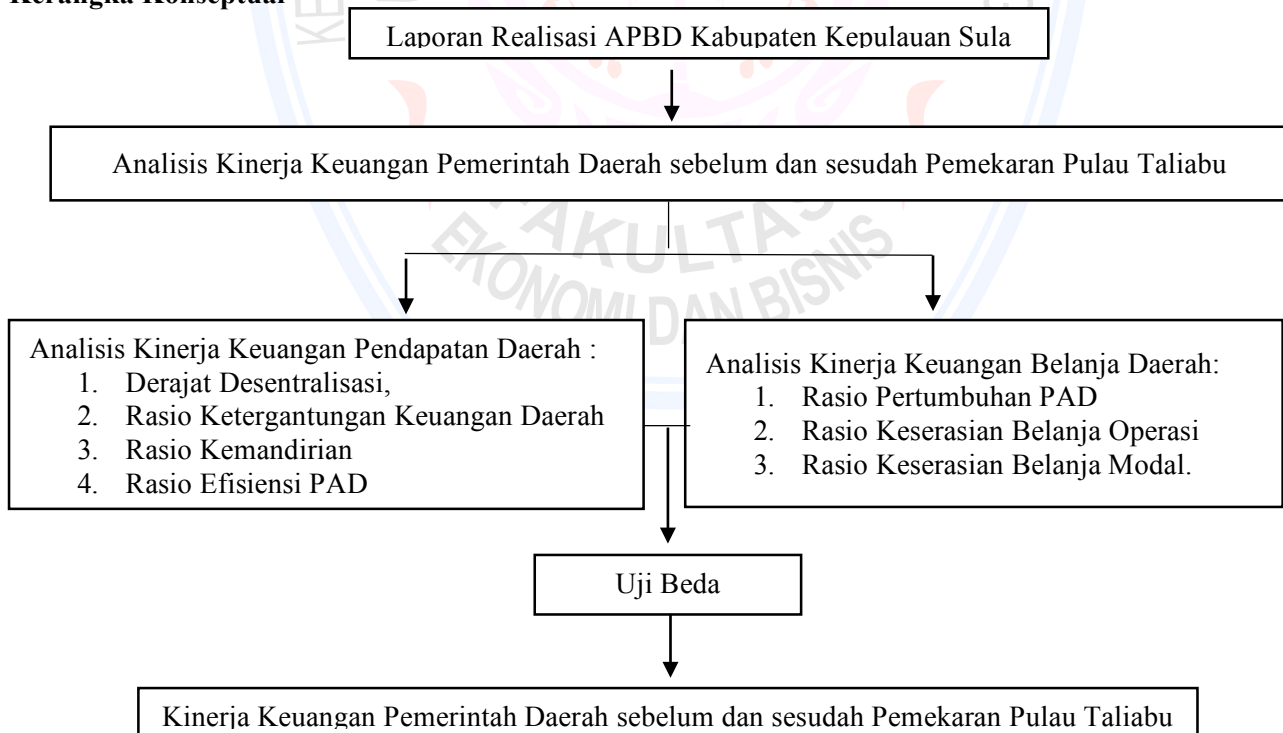
$$\text{Rasio belanja modal thd total belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

Poyoh, Murni & Tulung (2017) dalam studi Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. Hasil dari studi ini menunjukkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon dalam mengelola pendapatannya dikatakan belum baik hal ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan bahwa BKD belum mampu merealisasikan pendapatannya lebih dari yang dianggarkan.

Mengkuningtyas dan Adib (2016) dalam studi Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia sebelum dan sesudah pemekaran. Hasil t-test menunjukkan bahwa tidak ada nilai signifikan rasio kemandirian keuangan, efektivitas rasio pendapatan lokal, rasio efisiensi, sesuai rasio belanja modal dan pertumbuhan rasio pendapatan lokal.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber : Kajian Teoritik

METODE PENELITIAN**Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan komparatif untuk mencari perbedaan. Menurut Sugiyono (2012:29) deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data dokumenter dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui *website*/situs resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi berupa data umum dan data khusus, seperti Gambaran umum Kab.Kep.Sula, Gambaran umum BPS Kab.Kep.Sula dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab.Kep.Sula tahun anggaran 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yang diperoleh melalui *website* Badan Pusat Statistik Kab.Kep.Sula (<http://kepsulkab.bps.go.id>).

Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio keuangan seperti derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio efisiensi PAD, rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian belanja operasi dan rasio keserasian belanja modal. Dan analisis menggunakan uji beda paired sample T test.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****1. Rekap Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sebelum dan Sesudah Pemekaran Pulau Taliabu**

	Sebelum Pemekaran (%)				Sesudah Pemekaran (%)			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Derajat Desentralisasi	2.44	1.98	1.43	6.87	3.41	2.43	3.38	2.33
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	80.60	85.89	94.37	82.17	92.43	88.72	88.43	90.70
Rasio Kemandirian	3.03	2.31	1.51	8.35	3.69	2.47	3.83	2.57
Rasio Efisiensi PAD	107.73	106.97	105.22	107.62	103.18	88.23	104.84	111.72
Rasio Pertumbuhan PAD	72.13	26.46	20.49	57.39	52.43	36.28	10.94	24.16
Rasio Keserasian belanja Operasi	42.17	57.48	65.57	50.73	65.98	72.99	57.94	61.28
Rasio Keserasian Belanja Modal	51.14	42.52	39.10	49.27	34.02	27.01	29.07	38.72

Tabel. 2. Rekap Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Sebelum dan Sesudah Pemekaran Pulau Taliabu

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2018)

Berdasarkan tabel.2. Rekapitan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Sebelum dan Sesudah Pemekaran Pulau Taliabu dapat dilihat bahwa nilai derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio efisiensi PAD, rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian belanja operasi dan rasio keserasian belanja modal pada sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu dapat dinyatakan terdapat perbedaan akan tetapi tidak signifikan dikarenakan nilai tiap rasio mengalami nilai yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

2. Uji Statistik Paired Sample T Test

Uji Simultan

Tabel. 3. Hasil Uji Simultan, Paired Samples Correlations Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	sebelum - sesudah	2.49143	12.07747	2.28243	-2.19173	7.17458	1.092	27	.285

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2018.

H1 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Kab.kep.sula periode 2009-2012 (sebelum pemekaran) dan 2013-2016 (sesudah pemekaran).

Keputusan :

Berdasarkan Tabel. 3. Hasil Uji Simultan Paired Samples Test, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 0,285. Karena, probabilitas >0.05 maka H1 ditolak. Artinya TIDAK terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu.

Pembahasan

Uji Signifikansi Kinerja Keuangan Pemerintah Kab.Kep.Sula Periode 2009-2012 (Sebelum Pemekaran) dan 2013-2016 (Sesudah Pemekaran).

Berdasarkan Tabel 3 Hasil Uji Simultan Paired Samples Test, dapat dilihat derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian, rasio efisiensi PAD, rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian belanja operasi dan rasio keserasian belanja modal secara keseluruhan menunjukkan bahwa, nilai signifikan sebesar 0,285. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Artinya, dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu TIDAK berbeda. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mengkuningtyas dan Adib (2016), yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dari indikator kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi PAD, keserasian belanja modal dan pertumbuhan PAD sebelum dan setelah pemekaran TIDAK berbeda.

Derajat desentralisasi

Berdasarkan tabel 2 Derajat Desentralisasi, Milliar (ribu rupiah), dapat dikatakan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009-2012 atau sebelum pemekaran dan tahun 2013-2016 atau sesudah pemekaran pulau taliabu rendah. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi saat sebelum pemekaran pulau taliabu yaitu pada tahun 2012 sebesar 6.87%, sedangkan Derajat Desentralisasi terendah juga terjadi pada saat sebelum pemekaran pulau taliabu yaitu pada tahun 2011 sebesar 1.43%. Hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyelenggarakan desentralisasi berada di bawah 50%. Hasil ini mendukung pendapat dari Mahmudi (2016:140) bahwa, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi begitupun sebaliknya semakin rendah kontribusi PAD maka semakin rendah pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kab.Kep.Sula sebelum dan sesudah pemekaran pulau Taliabu tidak memiliki perbedaan dikarenakan pemerintah daerah saat sebelum dan sesudah pemekaran pulau Taliabu masih belum mampu menyelenggarakan desentralisasi.

Ketergantungan keuangan daerah

Berdasarkan tabel 2 Rasio ketergantungan keuangan daerah, Miliar (ribu rupiah) dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009-2012 atau sebelum pemekaran tinggi seperti yang ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 85.76%. Dan pada tahun 2013-2016 atau sesudah pemekaran juga lebih tinggi daripada sebelum pemekaran yaitu dengan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 90.07%. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah.

Sehingga, hasil ini menunjukkan bahwa baik sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu masih sama-sama terdapat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sangat besar terhadap pemerintahan pusat atau pemerintahan provinsi dikarenakan nilai rasio ketergantungan keuangan daerah berada di atas 50%. Hasil ini juga mendukung dari pendapat Mahmudi (2016:140) bahwa, semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat dan/atau pemerintah provinsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketergantungan keuangan daerah Kabupaten kepulauan sula terdapat perbedaan dikarenakan ketergantungan daerah semakin tinggi terjadi setelah pemekaran pulau taliabu.

Rasio Kemandirian

Berdasarkan Tabel 2 Rasio Kemandirian, Miliar (ribu rupiah) menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2009-2016 atau sebelum dan sesudah pemekaran Pulau Taliabu dapat digolongkan masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk dalam interaktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Menurut Mahmudi (2016:140), semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya. Dan berdasarkan pola hubungan kemandirian keuangan daerah menurut Abdul Halim (2007) dalam Adhiantoko (2013) bahwa kemampuan keuangan sedang-tinggi berkisar antara 50-100%. Namun, dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2009-2012 berada dibawah 25% atau rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi terutama terjadi saat sesudah pemekaran. Ini juga menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak aktif dalam menggali potensi-potensi yang dapat menambah PAD Kabupaten. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan Sula dilihat dari rasio kemandirian sula terdapat perbedaan dikarenakan kemandirian Kab.Kep.Sula lebih tinggi terjadi pada saat sebelum pemekaran pulau taliabu.

Rasio Efisiensi PAD

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 2 Rasio Efisiensi PAD, Milliar (ribu rupiah) Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2014 tergolong cukup efisien karena kriteria efisiensinya diantara 80%-90%. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatan tahun 2014 yaitu Rp 499.256.821 cukup besar daripada realisasi belanja daerah yaitu Rp440.477.015. Sedangkan, Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya sudah di atas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

Menurut Mahsun (2006) dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013), Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Artinya, kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100% atau semakin kecil rasio efisiensi maka kemampuan daerah akan semakin baik. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu tidak efisien dalam mengelola keuangan daerahnya karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target belanja daerah itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Meskipun pada tahun 2014 efisiensi kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sudah cukup efisien. Hal ini menandakan bahwa kinerja keuangan Kab. Kep. Sula sebelum dan sesudah pemekaran cukup fluktuatif sehingga terdapat perbedaan dikarenakan efisiensi keuangan Kab.Kep.Sula mengalami nilai cukup efisiensi saat sesudah pemekaran pulau taliabu.

Rasio Pertumbuhan PAD

Berdasarkan Tabel 2 Rasio Pertumbuhan PAD, Milliar (ribu rupiah) dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun anggaran 2009-2012 atau sebelum pemekaran menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Kepulauan Sula tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 72.13% dibanding tahun-tahun sesudahnya sampai tahun 2012. Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013), rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, hasil analisis rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Kepulauan Sula sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu terdapat perbedaan dikarenakan pertumbuhan sesudah pemekaran pulau taliabu dikategorikan belum cukup baik dibandingkan dengan sebelum pemekaran pulau taliabu hal ini dikarenakan pertumbuhan PAD sesudah pemekaran masih cukup fluktuatif

Rasio Keceriasan Belanja Operasi

Menurut Mahmudi (2016:162), Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 Rasio Keceriasan Belanja Operasi.dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Keceriasan Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2009-2012 atau sebelum pemekaran pulau taliabu yaitu senilai 53.99% dengan nilai yang sedikit meningkat dari tahun ketahun. Dan pada tahun 2013-2016 atau sesudah pemekaran pulau taliabu memiliki nilai rata-rata keserasian belanja operasi lebih besar yaitu senilai 64.55%. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya belanja pegawai untuk gaji PNS.

Menurut Mahmudi (2016:162), bahwa pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Dengan ini dapat simpulkan bahwa proporsi belanja operasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lebih mengarah pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan seperti belanja pegawai untuk gaji PNS dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Untuk proporsi belanja operasi yang mendominasi total belanja daerah terjadi pada tahun 2011 atau sebelum pemekaran dan 2013, 2014, 2016 atau sesudah pemekaran karena, nilai proporsi berada antara 60-90%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa proporsi belanja operasi Kab.Kep.Sula sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu terdapat perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari keserasian belanja operasi yang lebih mendominasi setelah terjadinya pemekaran pulau taliabu.

Rasio Keceriasan Belanja Modal

Menurut Mahmudi (2016:162), rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan untuk dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dilakukan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 Rasio Keceriasan Belanja Modal, Milliar (ribu rupiah) dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2009-2012 atau sebelum pemekaran sebesar 46.26%. Dan setelah pemekaran pulau taliabu, nilai rata-rata rasio keserasian belanja modal tahun 2013-2016 lebih kecil yaitu sebesar 32.21%. Menurut Mahmudi (2016:162), pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan tinggi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah pada Kabupaten Kepulauan Sula antara sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu tidak ada yang mencapai 5-20%. Namun, pada tahun 2014 proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah cukup mendekati yaitu sebesar 27.01%. Hal ini menandakan bahwa antara sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak terdapat perbedaan, dikarenakan keserasian belanja modal Kab.Kep.Sula memiliki tingkat pendapatan yang tinggi sehingga tingkat belanja modal untuk investasi masih cukup rendah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada rasio keuangan seperti rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio efisiensi PAD, rasio pertumbuhan PAD dan rasio keserasian belanja operasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, pada derajat desentralisasi dan rasio

keserasian belanja modal menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sebelum dan sesudah pemekaran pulau Taliabu. Dan berdasarkan uji simultan paired sample T test, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan Sula sebelum dan sesudah pemekaran pulau taliabu sehingga H1 di tolak. Sehingga, kinerja keuangan pemerintah Kab.Kep.Sula dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian belanja operasi, rasio keserasian belanja modal menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lebih baik saat sesudah pemekaran pulau taliabu. Berbeda dengan derajat desentralisasi, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan PAD yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lebih baik saat sebelum pemekaran pulau taliabu.

Saran

1. **Bagi Pemerintah**, Kabupaten Kepulauan Sula, diharapkan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja keuangan dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk menambah PAD sehingga dapat mempertahankan bahkan meningkatkan perekonomian daerah dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan dan uji paired sample T test ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi atas pelaksanaan laporan keuangan sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.
2. **Bagi Penulis Selanjutnya**, yang akan melakukan penelitian yang sama di Kabupaten Kepulauan Sula diharapkan untuk menambah periode penelitian dan metode penelitian sebagai alat pengukurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aluy, C. A., Tulung, Joy Elly, & Tasik, H. H. (2017). Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Manajemen Puncak Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Bumh dan Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2). <https://ejournal.unsraf.ac.id/index.php/emba/article/view/15997>
- Adhiantoko, H. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Asri, J.D. 2016 . Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.4. No.2. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4037/2903>, diakses pada tanggal 18 maret 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka 2011. <https://kepsulkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 28 februari 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka 2014. <https://kepsulkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 28 februari 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka 2015. <https://kepsulkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 28 februari 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka 2016. <https://kepsulkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 02 maret 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka 2017. <https://kepsulkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 02 maret 2018.
- Dwijayanti, R., dan Ruserlistyanti 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi SeIndonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.12. No.01.<https://media.neliti.com/media/publications/5139-ID-analisis-perbandingan-kinerja-keuangan-pemerintah-propinsi-seindonesia.pdf>, diakses pada 22 februari 2018.

- Kementerian Dalam Negeri 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mengkuningtyas, Y., dan Adib, N. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia sebelum dan sesudah pemekaran. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol 4, No 1 Semester Ganjil 2015/2016. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2390>. Diakses pada tanggal 20 maret 2018.
- Pauwah, S. Saerang, I. Mandey, S. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Journal of EMBA*. Vol. 2, No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5064/4582>, diakses pada tanggal 01 maret 2018.
- Pemerintahan Republik Indonesia 2003. Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pemerintahan Republik Indonesia 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah(pengertian pemekaran daerah).
- Pemerintahan Republik Indonesia 2003. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Pemerintahan Republik Indonesia 2014. Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
- Poyoh, C.M., Sri Murni., Tulung, J.E. 2017. Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. Vol.5. No.2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15958>, diakses pada tanggal 06 maret 2018.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Edisi Kedua. Bandung. Alfabeta, Bandung.
- Tulung, Joy Elly and Ramdani, Dendi (2016). "The Influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance". *International Research Journal of Business Studies*, Volume 8 Nomor 3, 155-166.
- Tulung, Joy Elly, and Dendi Ramdani. (2018) "Independence, Size and Performance of the Board: An Emerging Market Research." *Corporate Ownership & Control*, Volume 15, Issue 2, Winter 2018.